**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT DI DESA MUARA PANTUN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Fitriani1 , Marsuq2 , Suhardiman3**

1Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,Indonesia

2Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234,Indonesia

***ABSTRAK***

*Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui proses Collaborative Governance dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka) menunjukkan proses dialog dilakukan secara interaktif dalam artian saling bertanya dan menjawab baik pada kegiatan keterampilan yang diberikan dari kampus dan juga pemerintah daerah bahkan dalam pelatihan yang diberikan ada ruang komunikasi lanjutan dengan pelatih dan peserta lainnya dalam bentuk group WA yang bertujuan agar komunikasi peserta setelah pelatihan dapat berlanjut. Pada Trust Building (Membangun Kepercayaan) menunjukkan ada semacam keraguan terhadap kegiatan pemerintah terkait efektivitas kegiatan yang dilaksanakan keraguan tersebut didasari pada kegiatan yang dinilai setengah-setengah kurang total dalam memberikan pemberdayaan tidak cukup sampai pada tahap pelatihan tapi peserta meningkatan keterampilan kewirausahaan mesti dikontrol terus sampai mereka mandiri dan produktif. Pada indikator Commitment to Process (Komitmen Bersama) menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan kontribusi semua pihak dalam upaya peningkatan keterampilan kewirausahaan masyarakat keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini dapat tercapai jika ada sinergitas antara masing-masing pemangku kepentingan pemerintah sebagai pengarah, swasta dan LSM berkontribusi dalam berbagai bentuk dukungan baik secara fisik maupun moril atau motivasi. Pada indikator Shared Understanding (Pemahaman Bersama) menunjukkan pelatihan yang dirasakan masih belum maksimal bagi seluruh peserta ada yang mendapat dukungan pendanaan dan peralatan namun ada juga peserta yang hanya mendapat pengelaman. Kemudian pada indikator Intermedite outcome (Pencapaian hasil) menunjukkan bahwa proses kolaborasi terjadi jika peserta pelatihan keterampilan kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan serta menunjukkan progres yang bagus sehingga mendapat kesempatan untuk memperoleh bantuan seperti bantuan pendanaan yang bekerjasama dengan perbankan melalui kredit lunak namun yang perlu diperhatikan yaitu kolaborasi dapat berfungsi maksimal jika peserta peningkatan keterampilan kewirausahaan memiliki komitmen yang kuat.*

*Kata Kunci: Collaborative Governance, Keterampilan, Kewirausahaan, Masyarakat.*

**1. PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah berperan dalam memberikan kebijakan dan program yang terkait pengentasan kemiskinan di Indonesia yang masih menjadi masalah klasik yang mewarnai pembangunan baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan, upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai kurang menekankan pemberdayaan, kesan yang diberikan seolah-olah berupa belas kasihan sehingga dampaknya justru membuat masyarakat menjadi malas dan ada kecenderungan untuk mengharapkan bantuan dari berbagai pihak.

Kondisi ini tidak dapat dibiarkan sehingga perlu dilakukan upaya mengubah pemikiran dan perilaku masyarakat miskin agar memiliki kemampuan dan keberanian mencoba usaha yang bersifat produktif guna memperoleh pendapatan dari hasil usaha sendiri serta mampu keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan (Sukidjo, 2012:34).

Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan terhadap kondisi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri guna membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Pemberdayaan juga dapat dilihat sebagai upaya memberikan pengalaman baru bagi masyarakat. Pengalaman dapat diperoleh melalui pelatihan secara formal maupun informal melalui belajar dari kelompok masyarakat lain. Membuat masyarakat memiliki pengalaman yang sesuai kebutuhan mereka memungkinkan timbulnya kemampuan baru dalam melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Melalui upaya menguatkan daya masyarakat memiliki cara pandang baru, diharapkan masyarakat semakin berdaya dan mampu memilih berbagai alternative tindakan terbaik dalam meningkatkan kebutuhan ekonominya.

Pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana pemberdayaan masyarakat merupakan sarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis (Nugroho, 2013:864).

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat dan lingkungan sistem kepercayaan dan sistem nilai masyarakat tentang arti perubahan dan arti masa depan, dan mindscape masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu program atau proyek pengembangan dan memberdayakan masyarakat. Agar masyarakat sungguh terlibat di dalam setiap proses pengubahan, pola komunikasi yang digunakan haruslah yang hidup serta berakar dimasyarakat Rahman, K. (2018:189).

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam meningkatkan keterampilan

Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lembaga-lembaga yang membuat kebijakan program, Khususnya berkaitan dengan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun.
2. Kegunaan Akademik, diharapkan penelitian ini, menjadi salah satu referensi akademis dalam bidang administrasi publik dan menjadi informasi awal bagi peneliti lainnya yang mengkaji konsep *Collaborative Governance*.

**2. KERANGKA KONSEP**

**DAN TEORI**

**2.1. Tinjauan Pustaka**

**2.1.1. Konsep Governance**

Istilah *Governance* pertama dikemukakan dalam laporan ini, Bank Dunia tahun 1989 mendefinisikan *governance* sebagai “*exercise of political power to manage nation*”. Selanjutnya, laporan ini menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan civil society harus bersinergi membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif (Prianto, 2011:3).

Konsep *governance* bukanlah baru, konsep tersebut sama tuanya dengan peradaban manusia. Secara sederhana *governance* berarti : “ proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan”. *Governance* dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Governance juga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti : c*orporate governance, international governance, national governance* dan *local governance*. Selama *governance* adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, maka analisis mengenai *governance* terpusat pada pelaku pelaku ( aktor) formal dan tidak formal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terjadi serta berbagai struktur formal dan informal yang terkait. (Budisetyowati, 2017:2).

*Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka (Setyawan, 2004:12).

*Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara.

**2.2. Kerangka Pemikiran**

*Collaborative governance* adalah sebuah tata kelola pemerintahan dimana institusi-institusi pemerintahan secara langsung melibatkan aktor di luar pemerintah (baik masyarakat/ komunitas, NGOs, dan private sector) di dalam proses pengambilan keputusan secara formal, yang berorientasi pada kepentingan bersama. Penelitian ini melihat aspek *collaborative governance* dalam upaya meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur. Proses *collaborative governance* dapat dilihat dari indikator*: Face to Face Dialogue* (dialog/tatap muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitment to Process* (Komitmen Bersama), *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama) dan *Intermedite outcome* (Pencapaian hasil).

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan keterampilan kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur merupakan subyek dalam penelitian ini yang terdiri dari Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur selaku pihak pemerintah dan LSM/Sektor privat yang terlibat dalam pemberian pelatihan keterampilan bagi Masyarakat di Desa Muara Pantun. Untuk lebih jelasnya terkait alur pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur

LSM /Sektor Privat

Proses *Collaborative governance* dilihat dari:

1. Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka)
2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)
3. Commitment to Process (Komitmen Bersama)
4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama)
5. Intermedite outcome (Pencapaian hasil)

Keterampilan Kewirausahaan Masyarakat Desa

Masyarakat Desa Muara Pantun

**3. METODE PENELITIAN**

* 1. **Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur, dan di Desa Muara Pantun di Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur.

* 1. **Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya khususnya yang terkait *Collaborative Governance* dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur.

* 1. **Subyek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data atau lebih dikenal dengan istilah *purposive* (Arikunto, 2002:129). Adapun subyek penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur
2. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur
3. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam pelatihan kewirausahaan Masyarakat Desa Muara Pantun.
4. Masyarakat Desa Muara Pantun di Kecamatan Telen (Peserta Pelatihan keterampilan), Kabupaten Kutai Timur, 4 Orang.
   1. **Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian.

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban atau informasi dari informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian dilakukan dalam rangka melihat aktivitas pelatihan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur.

1. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian.

* 1. **Fokus Penelitian**

Adapun uraian atau deskripsi singkat terkait sejumlah yang menjadi fokus pada penelitian yaitu :

1. Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka) yakni diantara stakeholders harus membangun dialog tatap muka. Dialog tatap muka difungsikan untuk membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses pelatihan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun.
2. Trust Building (Membangun Kepercayaan) yaitu proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara para pemangku kepentingan yang terlibat seperti Dinas Koperasi UKM, LSM, dan masyarakat.
3. Commitment to Process (Komitmen Bersama) yaitu komitmen stakeholders sangat diperlukan untuk mengetahui kegagalan atau keberhasilan suatu kolaborasi khusus dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun.
4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama) yaitu dalam proses kolaborasi stakeholders harus memiliki pemahaman yang bersama untuk mencapai tujuan bersama yaitu terampilnya Masyarakat di Desa Muara Pantun dalam berwirausaha.
5. Intermedite outcome (Pencapaian hasil) yaitu kolaborasi mungkin lebih ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dalam artian ada masyarakat di Desa Muara Pantun yang berhasil membangun usaha secara maksimal melalui pelatihan keterampilan yang diberikan.
   1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017: 244).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display,* dan *conclusion drawing/verification.*

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan dilapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

1. *Data Display* (Penyajian Data).

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

1. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi).

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

**4. PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran proses *Collaborative Governance* dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur., secara khusus yang menjadi tempat atau lokasi penelitian diuraikan sebagai berikut.

1. **Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kutai Timur terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU. Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999.

Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kondisi geografi Kabupaten Kutai Timur yaitu memiliki luas wilayah 35.747,50 km², berpenduduk sebanyak 253.847 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dengan kepadatan 4,74 jiwa/km² dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahun.

Sedangkan dari kondisi Topoggrafi, Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton.

* Luas Wilayah = 3.334.620,28 Ha
* Jumlah Kecamatan = 18 Kecamatan
* Jumlah Desa/Kelurahan = 139 Desa, 2 Kelurahan

Landasan untuk memekarkan Kabupaten Kutai karena rentang kendali pemerintahan dan pembangunan terluas, dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati dan Kota Administrasif Bontang. Keinginan Pemerintah Kabupaten Kutai itu tertuang dalam keputusan DPRD Kutai Nomor 170/ -03/57/01/1997 tanggal 7 Februari 1999 tanggal 31 Maret 1999.

**4.2. HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur maka penelitian ini diarahkan untuk melihat proses collaborative governance dari indikator: *Face to Face Dialogue* (dialog/tatap muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitment to Process* (Komitmen Bersama), *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama) dan *Intermedite outcome* (Pencapaian hasil). Untuk lebih jelasnya mengenai uraian indikator tersebut maka dapat disajikan sebagai berikut.

1. ***Face to Face Dialogue* (dialog/tatap muka**)

Pada indikator *Face to Face Dialogue* (dialog/tatap muka) melihat keberadaan stakeholders yang berperan membangun dialog tatap muka. Dialog tatap muka difungsikan untuk membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses pelatihan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun.

“kita tahun lalu ini adakan dialog dengan masyarakat untuk mengetahyi mengenai keperluan masyarakat kit juga dialog kala itu merupakan media konsultasi dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM klinik Koperasi dan UKM yang bersifat Konsultatif dan bersifat Tindak Lanjut”

(Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pendekatan *Face to Face Dialogue* dengan masyarakat dalam kegiatan yang bertajuk konsultasi dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM memiliki manfaat yang bersifat konsultatif dan kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang dialog semata namun juga memiliki tindaklanjut dalam program-program dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur.

Untuk memberikan gambaran terkait respon masyarakat terhadap kegiatan dialog yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM maka dilakukan wawancara dengan informan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam pelatihan kewirausahaan Masyarakat Desa Muara Pantun yang mengatakan bahwa:

“pasti ada dialog untuk kegiatan seperti pelatihan pembuatan abon ikan perlu tindaklanjut kalau sudah diajari tentu harus didukung juga sama alat-alatnya sampai memasarannya itu juga untuk kegiatan pelatihan menjahit misalnya harus didukung dengan pemasarannya agar mereka setelah mengikuti pelatihan bisa mandiri”

(Hasil wawancara, tanggal 26 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dialog pada setiap kegiatan pelatihan keterampilan itu dilakukan namun tidak cukup hanya dengan dialog perlu tindaklanjut untuk setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur seperti pada pelatihan yang membutuhkan keterampilan pembuatan abon dan menjahit perlu tindaklanjut seperti bantuan peralatan dan pemasaran tentu persiapan pendanaan juga mesti dipikirkan oleh pemerintah agar keberlanjutan kegiatan dapat terus memberikan manfaat bagi pelaku usaha.

Untuk memperoleh informasi dari masyarakat terkait proses dialog yang dilakukan oleh pemerintah maka dilakukan wawancara dengan informan masyarakat SS yang mengatakan bahwa:

“kami bertanya dengan pelatih seperti pelatihan keterampilan pengolahan sampah plastik kemarin itu dari kampus yang ada disini dibantu mahasiswa itu menyenangkan ada juga kegiatan dari pemerintah pelatihan keterampilan menjahit itu kita berlanjut komunikasi dibuat grup WA itu agar komunikasi semakin lancar”

(Hasil wawancara, tanggal 22 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui proses dialog dilakukan secara interaktif dalam artian saling bertanya dan menjawab baik pada kegiatan keterampilan yang diberikan dari kampus dan juga pemerintah daerah bahkan dalam pelatihan yang diberikan ada ruang komunikasi lanjutan dengan pelatih dan peserta lainnya dalam bentuk group WA yang bertujuan agar komunikasi peserta setelah pelatihan dapat berlanjut dan memberikan ruang untuk tindaklanjut kegiatan yang telah dilaksanakan seperti informasi pelatihan selanjutnya dan informasi tentang pemberian bantuan lain kewirausahaan seperti pendanaan dan peralatan.

1. ***Trust Building* (Membangun Kepercayaan)**

Pada aspek ini menekankan proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara para pemangku kepentingan yang terlibat seperti Dinas Koperasi UKM, LSM, dan masyarakat. Untuk menelusuri upaya membangun kepercayaan maka dilakukan penelusuran wawancara dengan informan Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan bahwa:

“kita memang mesti percaya dengan kegiatan yang diberikan dan masyarakat juga mesti antusias mengikuti kegiatan jangan dan juga mitra kita juga tunjuk orangnya itu profesional yang karakternya bagus lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat karena ini memang pekerjaan yang memerlukan dedikasi terhadap kepentingan masyarakat”

(Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah sendiri mesti yakin dengan kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya sekedar melaksanakan tugas demikian juga dengan masyarakat diperlukan antusiasme masyarakat guna mendukung keberhasilan kegiatan disamping itu kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat ini didukung dengan pelatih yang profesional yang memahami arti penting dari peran sebagai agen perubahan ditengah-tengah masyarakat di Desa Muara Pantun.

Kepercayaan terhadap program kegiatan keterampilan kewirasaan ini mendapat kritis dari salah satu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Muara Pantun yang mengatakan bahwa:

“kita bukannya tidak yakin dengan kegiatan yang dilakukan pemerintah tapi kita inginnya itu pemerintah total dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat jangan sampai setengah-setengah kesannya tidak tuntas anggaran jadi tidak efektif”

(Hasil wawancara, tanggal 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa ada semacam keraguan terhadap kegiatan pemerintah terkait efektivitas kegiatan yang dilaksanakan keraguan tersebut didasari pada kegiatan yang dinilai setengah-setengah kurang total dalam meberikan pemberdayaan tidak cukup sampai pada tahap pelatihan tapi peserta meningkatan keterampilan kewirausahaan mesti dikontrol terus sampai mereka mandiri dan produktif.

1. ***Commitment to Process* (Komitmen Bersama)**

Indikator ini mencermati komitmen stakeholder sangat diperlukan untuk mengetahui kegagalan atau keberhasilan suatu kolaborasi khusus dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun. Untuk menelusuri proses pembangunan komitmen bersama ini maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan bahwa:

“pemberdayaan masyarakat ini memerlukan komitmen bersama tentunya tidak bisa kalau hanya pemerintah sendiri yang jalan yang terpenting adalah sinergitas kita swasta dan lembaga non pemerintah atau LSM yang ikut andil dan berkontribusi dalam memberikan pendidikan kewirausahaan kepada masyarakat kita ini nah sebenarnya inilah yang diharapkan dalam good governance”

(Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah memerlukan kontribusi semua pihak dalam upaya peningkatan keterampilan kewirausahaan masyarakat keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini dapat tercapai jika ada sinergitas antara masing-masing pemangku kepentingan pemerintah sebagai pengarah, swasta dan LSM berkontribusi dalam berbagai bentuk dukungan baik secara fisik maupun moril atau motivasi.

Pentingnya komitmen bersama juga mendapat dukungan dari LSM yang sering bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, adapun hasil

1. ***Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)**

Pemahaman bersama yang dimaksud yaitu dalam proses kolaborasi stakeholder yang memiliki pemahaman bersama untuk mencapai tujuan bersama yaitu terampilnya Masyarakat di Desa Muara Pantun dalam berwirausaha. Pemerintah berusaha memberikan pemahaman kepada berbagai stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaannya hal ini dikemukakan oleh informan Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan bahwa:

Gambar 2. Alur Transfer pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan kepada masyarakat Desa Muara Pantun

Kondisi Awal Masyarakat

Sasaran dan tujuan pemerintah

Potensi Lokal, sosial, dan ekonomi

Model pelatihan kewirausahaan

Pendampingan dan Evaluasi

Peningkatan:

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Keterampilan

Pendapatan & kemandirian Masyarakat Desa Muara Pantun

Berdasarkan gambar yang disajikan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif memiliki tujuan dan sasaran dalam meningkatkan keterampilan UKM di Kabupaten Kutai Timur tujuan tersebut mesti diselaraskan dengan potensi lokal, sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan sehingga dapat ditentukan model pelatihan keterampilan yang sesuai. Setelah pelatihan dilaksanakan maka selanjutnya dilakukan pendampingan kepada peserta pelatihan yang telah mengikuti setiap sesi hal ini bertujuan agar peserta dapat meningkatkan pengetahuan kewirausahaan, keterampilan, dan sikap melalui motivasi yang diberikan oleh instruktur dan pada akhirnya peserta pelatihan dapat mengembangkan usaha dan memiliki kemandirian.

1. **Intermedite outcome (Pencapaian hasil)**

Kolaborasi mungkin lebih ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dalam artian ada masyarakat di Desa Muara Pantun yang berhasil membangun usaha secara maksimal melalui pelatihan keterampilan yang diberikan. Untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian hasil dari kolaborasi yang dilakukan maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan bahwa:

“kolaborasi yang terjadi jika proses telah dilalui seperti pelatihan dan pendampingan kita nilai layak mendapat bantuan dari itulah bisa ada ruang untuk mempermudah bantuan pencairan dana keperbankan untuk dapat kredit lunak saling mengisilah untuk mengembangkan UMKM kita ini”

(Hasil wawancara, tanggal 22 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa proses kolaborasi terjadi jika peserta pelatihan keterampilan kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan serta menunjukkan progress yang bagus sehingga mendapat kesempatan untuk memperoleh bantuan seperti bantuan pendanaan yang bekerjasama dengan perbankan kemudian keperluan lainnya seperti peralatan dapat diisi oleh swasta melalui CSR-nya.

Adapun alur kolaborasi dalam peningkatan keterampilan kewirausahaan di Desa Muara Pantun dapat disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 3. Alur kolaborasi dalam peningkatan keterampilan kewirausahaan di Desa Muara Pantun**

Masyarakat/Peserta Pelatihan

Pemerintah:

Memfasilitasi, melakukan pembinaan, dan pengawasan

Swasta Melalui CSR:

Memberikan bantuan

Kegiatan Pendampingan

LSM : Mewadahi, Memberikan perlindungan, dan dukungan

Mampu mengelola Usaha

BANK:

Memberikan kredit lunak

Pengusaha yang produktif dan mandiri

Berdasarkan gambar yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa kolaborasi dapat berfungsi maksimal jika peserta peningkatan keterampilan kewirausahaan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan usahanya memungkinkan keterlibatan sejumlah pihak dalam membantu mengembangkan usaha salah satunya melalui Bank yang bermitra dengan pemerintah untuk memberikan kredit lunak sebagai modal dalam pengembangan usaha yang dapat diberikan setelah dievaluasi melalui kegiatan pendampingan sementara sektor privat/swasta memberikan dukungan bantuan dan LSM mewadahi kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan advokasi.

Untuk menguraikan keberhasilan kolaborasi ini maka dilakukan wawancara dengan informan masyarakat RA yang mengatakan bahwa:

“saya kebetulan senang dengan menjahit jadi saya ikut pelatihan ini syukur saya dapat banyak ilmu dan ini sangat berguna buat saya dalam mengembangkan usaha dan saya iseng minta bantuan untuk modal dan akhirnya dapat juga kredit untuk bangun tempat jahit saya sekarang saya tidak begitu terbebani dengan kreditnya karena penghasilan masih lebih banyak”

(Hasil wawancara, tanggal 25 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peserta pelatihan yang memiliki dasar yang kuat untuk berwirausaha mendapat dukungan lebih dari pemerintah dan stakeholder yang terlibat yang dapat membantu mengembangkan usaha melalui pencairan dana kredit lunak UMKM yang tidak terlalu membebani peserta namun justru dapat memberikan manfaat karena dapat menjadi pengusaha mandiri yang produktif. Namun berbeda dengan informan HA yang mengatakan bahwa:

“saya ikut sekali namun belum bisa mendapat bantuan karena saat ini memang saya sambil ada sawit juga saya kerja jadi tidak begitu fokus disitu waktu saya ikut pelatihan karena dorongan teman tapi saya bilang tidak apa-apa tambah pengetahuan saja”

(Hasil wawancara, tanggal 25 Mei 2019)

Berdasarkan hasil penelitian terkait proses *Collaborative Governance* dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur yang dilihat dari indikator kolaborasi Ansell & Gash, (2008) yaitu *Face to Face Dialogue* (dialog/tatap muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitment to Process* (Komitmen Bersama), *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama) dan *Intermedite outcome* (Pencapaian hasil) menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pendekatan *Face to Face Dialogue* dengan masyarakat dalam kegiatan yang bertajuk konsultasi dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM memiliki manfaat yang bersifat konsultatif dan kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang dialog semata namun juga memiliki tindaklanjut dalam program-program dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur.

Dialog pada setiap kegiatan pelatihan keterampilan itu dilakukan namun tidak cukup hanya dengan dialog perlu tindaklanjut untuk setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur seperti pada pelatihan yang membutuhkan keterampilan pembuatan abon dan menjahit perlu tindaklanjut seperti bantuan peralatan dan pemasaran tentu persiapan pendanaan juga mesti dipikirkan oleh pemerintah agar keberlanjutan kegiatan dapat terus memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Proses dialog dilakukan secara interaktif dalam artian saling bertanya dan menjawab baik pada kegiatan keterampilan yang diberikan dari kampus dan juga pemerintah daerah bahkan dalam pelatihan yang diberikan ada ruang komunikasi lanjutan dengan pelatih dan peserta lainnya dalam bentuk group WA yang bertujuan agar komunikasi peserta setelah pelatihan dapat berlanjut dan memberikan ruang untuk tindaklanjut kegiatan yang telah dilaksanakan seperti informasi pelatihan selanjutnya dan informasi tentang pemberian bantuan lain kewirausahaan seperti pendanaan dan peralatan.

Selanjutnya pada *Trust Building* (Membangun Kepercayaan) menunjukkan pemerintah mesti yakin dengan kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya sekedar melaksanakan tugas demikian juga dengan masyarakat diperlukan antusiasme masyarakat guna mendukung keberhasilan kegiatan disamping itu kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat ini didukung dengan pelatih yang profesional yang memahami arti penting dari peran sebagai agen perubahan ditengah-tengah masyarakat di Desa Muara Pantun. Ada semacam keraguan terhadap kegiatan pemerintah terkait efektivitas kegiatan yang dilaksanakan keraguan tersebut didasari pada kegiatan yang dinilai setengah-setengah kurang total dalam meberikan pemberdayaan tidak cukup sampai pada tahap pelatihan tapi peserta meningkatan keterampilan kewirausahaan mesti dikontrol terus sampai mereka mandiri dan produktif.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul *Collaborative Governance* dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator Dialog menunjukkan proses dialog dilakukan secara interaktif dalam artian saling bertanya dan menjawab baik pada kegiatan keterampilan yang diberikan dari kampus dan juga pemerintah daerah bahkan dalam pelatihan yang diberikan ada ruang komunikasi lanjutan dengan pelatih dan peserta lainnya dalam bentuk group WA yang bertujuan agar komunikasi peserta setelah pelatihan dapat berlanjut. Pada Trust Building (Membangun Kepercayaan) menunjukkan ada semacam keraguan terhadap kegiatan pemerintah terkait efektivitas kegiatan yang dilaksanakan keraguan tersebut didasari pada kegiatan yang dinilai setengah-setengah kurang total dalam meberikan pemberdayaan tidak cukup sampai pada tahap pelatihan tapi peserta meningkatan keterampilan kewirausahaan mesti dikontrol terus sampai mereka mandiri dan produktif. Pada indikator Commitment to Process (Komitmen Bersama) menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan kontribusi semua pihak dalam upaya peningkatan keterampilan kewirausahaan masyarakat keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini dapat tercapai jika ada sinergitas antara masing-masing pemangku kepentingan pemerintah sebagai pengarah, swasta dan LSM berkontribusi dalam berbagai bentuk dukungan baik secara fisik maupun moril atau motivasi. Pada indikator *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama) menunjukkan pelatihan yang dirasakan masih belum maksimal bagi seluruh peserta ada yang mendapat dukungan pendanaan dan peralatan namun ada juga peserta yang hanya mendapat pengelaman. Model pelatihan yang diberikan terlalu banyak memberikan teori kepada peserta sehingga cenderung memakan waktu lama sementara peserta menginginkan praktek yang banyak apalagi teknik baru yang mereka melihatnya memerlukan waktu untuk diikuti selain itu peserta lebih didukung lagi masalah pemasaran secara nyata karena hal ini dinilai merupakan bagian paling penting dalam hal kewirausahaan. Kemudian pada indikator Intermedite outcome (Pencapaian hasil) menunjukkan bahwa proses kolaborasi terjadi jika peserta pelatihan keterampilan kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan serta menunjukkan progres yang bagus sehingga mendapat kesempatan untuk memperoleh bantuan seperti bantuan pendanaan yang bekerjasama dengan perbankan melalui kredit lunak namun yang perlu diperhatikan yaitu kolaborasi dapat berfungsi maksimal jika peserta peningkatan keterampilan kewirausahaan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan usahanya.

* 1. **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Diperlukan metode yang lebih efektif dalam memberikan materi agar teori yang diberikan pada saat latihan dapat dikurangi diperbanyak dengan praktek langsung.
2. Diperlukan komunikasi dengan pihak perusahaan terutama perusahaan sawit yang ada di Desa Muara pantun agar memberikan kontribusi maksimal bagi kegiatan kewirausahaan yang diikuti oleh masyarakat.
3. Sebaiknya yang lebih dimaksimalkan adalah kualitas peserta dibandingkan kuantitas peserta karena tujuan pemberdayaan dapat tercapai jika dilakukan secara tuntas dan manfaatnya dirasakan betul oleh peserta dan masyarakat sekitar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulsyani, (2007). Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara.

Alma, Buchari (2014). Kewirausahaan. Cetakan ke.20. Bandung: Alfabeta.

Amachi, Tubagus Chairul. (2012). Kebijakan tentang publikmenurut perspektif good governance di Indonesia. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory, 18(4), 543-571.

Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 401-420.

Budisetyowati, D. A. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. UMJ.

Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. Princeton University Press.

Hakim, D. (2012). Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa. Prosiding Seminas, 1(2).

Indri Erkaningrum, F. (2015). Collaborative governance: daya upaya perguruan tinggi merealisasikan harapan pemangku kepentingan. Sumber:www.academia.edu/34825788/COLLABORATIVE\_GOVERNANCE.pdf, diakses 5 Maret 2019.

Kurniasih, D. (2017). Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora, 19(1), 1-7.

Lai, E. R. (2011). Collaboration: A literature review. Pearson Research Report, 2.

Lestari, E. P. (2010). Penguatan ekonomi industri kecil dan menengah melalui platform klaster industri. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 6(2), 146-157.

Malau, Natalia Artha. (2015). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan , Jurnal Ilmiah “integritas”,. Vol. 1 No.4, Desember, hal. 1-11.

Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Politeknik Kridatama Bandung.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.

Nugroho, D. A. B. (2013). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Publik, 1(5), 862-871.

Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).

Rahman, K. (2018). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 2(2), 189-199.

Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

Setyawan, Dharma Salam, (2004). Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta

Sinarasri, Andwiani. (2013). Analisis Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Strategi Bisnis Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima Bidang Kuliner di Semarang), Prosiding Seminar Nasional 2013 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari.

Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K. N., & Firman, T. (2013). Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi Pada Masyarakat Non-Kolaboratif. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 29(2), 133-144.

Sufianty, E. (2014). Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non Kolaboratif (Leadership and Collaborative Planning in Non-Collaborative Community). Journal of Regional and City Planning, 25(1), 78-96.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

Sukidjo, S. (2012). Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. Jurnal Economia, 8(1), 33-41.

Sururi, A. (2018). Collaborative Governance sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). HUMANIKA, 25(1).

Tedjasukmana, B., & Nagel, P. J. F. (2018). Peranan Literasi Akuntansi Bagi Pendidikan Kewirausahaan Dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 259-265.

Wahyudin, U. (2012). Pelatihan kewirausahaan berlatar ekokultural untuk pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(1), 55-64.

Wanna, John. (2008). Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes, Janine O’Flynn and John Wanna. Collaboratif Governance, A new era of public policy in Australia. Canberra: ANU E-Press.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.